

# REFORMASI, KEBANGKITAN NASIONAL, DAN KEWASPADAAN NASIONAL

Putu Sastra Wingarta<sup>1</sup>

*Tahun 2008 dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia adalah tahun ke-100 kebangkitan nasional. Kalau dikaitkan dengan tahun 1998 sebagai tahun lahirnya reformasi, tahun 2008 akan menjadi satu dasawarsa reformasi. Singkat kata, peristiwa politik Indonesia sampai tahun 2008 ini adalah 100 tahun kebangkitan nasional; 10 tahun reformasi. Peristiwa politik adalah interaksi antara negara dengan warga negaranya dan atau interaksi diantara warga negara itu sendiri, interaksi sosial, interaksi antara komponen bangsa. Apakah ada yang menarik? Lalu apa kaitannya dengan Kewaspadaan Nasional serta masa depan perpolitikan nasionalnya?*

Sebelum membahas lebih jauh tentang Reformasi, Kebangkitan Nasional dan Kewaspadaan Nasional berikut korelasi antara variable masing-masing, ada baiknya kalau dimulai dengan memaknai kata-kata Nasional dalam kata Kebangkitan Nasional maupun Kewaspadaan Nasional. Kata-kata nasional tidak sekedar menunjukkan lingkup geografi seluruh tanah air wilayah Indonesia, tetapi ada makna yang lebih dari itu. Nasional di sini juga mengandung pemaknaan adanya konsep "*nation*" (*nationalism*) yang harus

dipahami; konsep yang diperkenalkan oleh Ernest Renan dan Otto Bouer, lalu dirujuk oleh *founding fathers* Indonesia. Renan mengatakan bahwa yang disebut *nation* atau bangsa, tidak sekedar kumpulan orang-orang yang didasarkan karena adanya persamaan etnis, ras, agama dan bahkan bahasa. Bangsa atau *nation* menurut Renan adalah kumpulan orang-orang yang ingin meraih cita-cita dan tujuan yang dikehendaki bersama karena memiliki kesamaan jiwa (*soul*) tanpa peduli dan menghiraukan latar belakang etnis, agama, ras

---

<sup>1</sup> Putu Sastra Wingarta, Deputi Pendidikan Lemhannas RI

maupun bahasa. Otto Bouer menambahkan bahwa kumpulan orang-orang itu memiliki latar belakang kesamaan pengalaman senasib sepenanggungan, sehingga sepakat untuk meraih cita-citanya menggunakan kesamaan jiwanya. Pemahaman tadi dilengkapi lagi oleh Bung Karno dengan teori Geopolitik dan Geo Strateginya dengan menyebutkan bahwa kesamaan jiwa dan pengalaman kumpulan orang-orang itu berada pada suatu wilayah yang jelas batas-batasnya yang disebut Indonesia dari Sabang sampai Meraoke. Tambahkan makna yang diberikan Bung Karno itu menunjukkan semakin jelasnya keberadaan Nasionalisme Indonesia. Nasional di sini juga mengandung pemaknaan konstalasi atau kumpulan dan karakter Bangsa Indonesia. Bung Karno mengatakan ketika pertama kali meresmikan berdirinya Lemhannas - RI tanggal 20 Mei 1965;

".....saya amat setuju sekali bahwa lembaga yang hari ini kita buka adalah Lembaga Pertahanan Nasional. Dan saya mengharap pernyataan nasional di sini bukan diartikan , yah.. ini adalah pertahanan dari seluruh tanah air, seluruh natie, seluruh bangsa, tetapi hendaknya pernyataan nasional di sini dipahami pula dalam arti mempergunakan, mendasarkan pertahanan kita itu betul-betul atas segenap konstalasi dan karakteristik dari pada natie kita sendiri. Tidak bisa dijiplak-jiplakkan". (Lemhannas-RI, 2007)

Secara substansi, Bung Karno memaknakan kata-kata Nasional di sini sebagai jati diri yang harus dipahami agar tidak mudah *menjiplak* yang mungkin saja tidak benar atau tidak sesuai dengan jati diri yang kita miliki untuk kepentingan membangun Bangsa dan Negara. Hal ini penting untuk pedoman dalam setiap melangkahkan kaki , bangkit, melakukan reformasi dan waspada dalam menjalani kehidupan nasional kedepan; penting bagi sebuah reformasi, kebangkitan nasional dan kewaspadaan nasional serta penting untuk perpolitikan nasional kedepan.

### **Reformasi dan Kebangkitan Nasional (National Revivalism)**

Kata-kata Reformasi tiba-tiba mencuat, lalu populer seiring dengan lahirnya suatu gerakan dari kesadaran dan kepedulian arah perjalanan bangsa dan negara dalam menjalankan kehidupan atau perpolitikan nasionalnya. Reformasi yang selanjutnya termaknakan sebagai penggal waktu atau era dengan istilah era reformasi dimulai di seputar tahun 1998 yang ditandai oleh suatu gerakan untuk kembali kekehidupan nasional yang sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945.

Era reformasi dalam kehidupan politik di Indonesia adalah era perubahan yang ditandai

dengan pergantian rezim dari rezim orde baru ke rezim reformasi. Rezim orde baru sendiri lahir sebagai bentuk kehendak melakukan perubahan dari rezim sebelumnya yang disebut rezim orde lama. Setiap rezim akan selalu mencoba untuk mengklaim dan menawarkan suatu kehidupan politik yang disebut sistem politik yang terbaik untuk menuju dan menciptakan kebaikan bersama atau *public good*. Ramlan Surbakti, (1992) mengatakan; "rezim terbaik ialah keseluruhan tata masyarakat, politik, ekonomi, sosial budaya, yang dianggap terbaik bagi negara-bangsa".

Orde Baru yang awal-awal kelahirannya di seputar tahun 1966, bertekad untuk menjalankan UUD 1945 secara murni dan konsekuen ternyata melakukan berbagai penyimpangan-penyimpangan yang menjadikan kehidupan nasional lebih dikooptasi oleh filosofi kehidupan berideologi kapitalisme-liberalisme, maraknya korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan sistem pemerintahan yang sentralistik; kehidupan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila digunakan hanya sebatas jargon kekuasaan. Singkat kata, era reformasi adalah era koreksi akan deviasi politik nasional Indonesia yang dijalankan rezim Orde Baru. Sebenarnya sama

saja dengan kelahiran Orde Baru yang pada awalnya merupakan bentuk koreksi jalannya politik nasional yang dijalankan oleh rezim Orde Lama, namun di tengah perjalanannya mengalami deviasi juga.

Pertanyaan generik muncul; adakah perjalanan politik nasional di era reformasi yang pada tahun 2008 ini berusia 10 tahun atau satu dasa warsa, masih pada relnya yang benar? Atau mungkin justru sudah semakin mengalami deviasi, semakin melemahkan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, semakin melemahkan *bargaining power*-nya dalam percaturan politik global, selain capaian-capaiannya terbaiknya pada bidang-bidang tertentu. Pertanyaan generik lain; apakah reformasi satu dasa warsa ini masih dimaknai sebagai masa transisi yang menjadikan era reformasi masih toleransikan gaduh, dengan berbagai kegagapan dan kegamangannya. Tatanan politik nasional yang lama terlanjur hancur lebur, tatanan politik nasional yang baru masih dicari-cari. Padahal Presiden SBY dalam berbagai kesempatan mengingatkan bahwa reformasi adalah *change and continuity*; yang tidak baik diubah, yang baik kita lestarikan keberlanjutannya.

Apabila era reformasi masih dimaknai sebagai masa transisi

politik nasional, apakah masa transisi harus dilakukan demikian lama sehingga harus membutuhkan waktu sampai sepuluh tahun atau mungkin masih minta lebih. Transisi, adalah sebuah kenyataan dari tahapan proses, suatu penggal waktu yang diperlukan ketika adaptasi perubahan harus dilakukan. Lama dan cepatnya relatif, walau dalam konteks reformasi, semakin cepat semakin baik sehingga pembenaran akan kegaduhan berlama-lama masa transisi dapat diakhiri. Sepuluh tahun sejak 1998 sampai 2008 adalah kurun waktu yang lebih dari cukup untuk melakukan transisi dari deviasi politik nasional masa orde baru, karena orde baru sendiri hanya butuh waktu lima tahun sejak 1966, melakukan transisi untuk menghasilkan *frame work* dan *road map* politik nasionalnya, yang dimulai dengan Pemilu 1971. Paling tidak sampai dengan dasa warsa 80-an, *frame work* dan *road map* itu masih dipatuhi oleh rezim orde baru, lalu mengalami perkembangan dan keluar jalur sampai dikoreksi melalui gerakan reformasi yang menjadikan rezim orde baru berakhir dan diganti oleh rezim baru; rezim reformasi.

Implementasi reformasi selama sepuluh tahun terakhir, di balik keberhasilan yang dicapainya, lebih ditandai dengan de-

mokratisasi, pergeseran peran aktor politik dalam sistem perpolitikan nasional. Kebijakan publik yang awalnya menjadi domain pusat bergeser menjadi domain daerah. *Top down* bergeser menjadi *bottom up*; yang didominasi aktor politik partai politik, pengusaha dan LSM, serta supremasi negara yang bergeser ke mekanisme pasar. Hasilnya; era reformasi yang tertoleransi sebagai masa transisi yang sudah sepuluh tahun ini, dirasakan sebagai sebuah kerja besar yang melelahkan, menguras tenaga, ekonomi biaya tinggi dan penuh kegaduhan, potensi maupun manivest merusak kultur dan tatanan sosial masyarakat serta merusak perpolitikan nasional menurut amanat pembukaan UUD 1945.

Nasionalisme Indonesia mengalami degradasi karena primordialisme, nasionalisme etnisitas, radikalisme dan anarkhisme seolah-olah memperoleh tempat dalam sistem perpolitikan nasional era reformasi ini. Kondisi seperti ini seharusnya disadari dan diwaspadai oleh setiap anak bangsa. Diperlukan gerakan nasional penyadaran diri (*to revive*); dan *to be aware*, lalu bangkit dan keluar dari kegaduhan itu. Momentum itu harus segera diambil sebelum terpuruk lebih dalam karena toleransinya yang terlalu lama. Toleransi itu harus diakhiri

dengan melakukan konsolidasi agar bisa memilih dan memilah yang mana baik dan mana yang tidak baik, mana yang sudah harus dibuang, yang mana masih diperlukan namun diubah, dan mana yang harus terus dilestarikan. Ini yang harus kita lakukan pada seratus tahun kebangkitan nasional agar kegaduhan di era reformasi tidak menjadi bola liar dalam sistem politik nasional dan mengancam integrasi nasional.

Kalau kali ini kita bicara masalah kebangkitan nasional, berarti kita akan bicara masalah kebangkitan nasionalisme dan bicara masalah kebangkitan menggunakan kekuatan konstalasi dan karakteristik dari Bangsa sendiri. Artinya; kebangkitan yang didasarkan pada kesadaran dan pemahaman akan kemampuan, kekuatan yang kita miliki. siapa diri kita, dari mana asal kita, bagaimana mentalitas kita, kultur kita, peradaban kita jati diri kita dan sebagainya, untuk menghindari asal jiplak yang belum tentu sesuai dengan karakter yang kita miliki. Kebangkitan yang rasional dari hasil hitung-hitungan akurat tentang siapa diri kita, siapa musuh kita, dan seperti apa lingkungan bermainnya. *Tsun Zu* ahli strategi pada jamannya mengatakan; "ketahui dirimu, ketahui musuhmu, seribu kali perang, seribu kali

akan menang". Ini yang kita jadikan pedoman bila bangkit dan melangkah.

Apabila (gerakan) Budi Oetomo tahun 1908 dan (gerakan) Sumpah Pemuda tahun 1928 yang sering dikatakan sebagai Kebangkitan Nasional II dulu hanya mampu menghasikan kesadaran dan pemahaman tentang makna nasionalisme sebagai tuntutan hak sebagai "kami" dari "mereka" yang penindas dan penjajah, namun secara pisik belum mampu mewujudkan dalam sebuah Negara Kebangsaan (*nation state*) Indonesia seperti yang diidam-idamkan, Negara Kebangsaan yang merdeka yang ingin meraih cita-citanya sendiri berdasarkan jati diri "kami" yang dimiliki dan tidak berdasarkan jati diri "mereka" yang penindas dan penjajah. Baru pada tanggal 17 Agustus 1945 hal itu dapat diwujudkan. *Founding Father* kita sadar bahwa hanya dengan *nation state* yang merdeka cita-cita itu dapat diraih. *The classic style* penindas dan penjajah yang menggunakan ideologi kolonialisme dan imperialisme berakhir dengan kebangkitan *the new style* yang menempatkan hak setiap bangsa menentukan nasibnya sendiri dalam perkampungan dunia yang majemuk multi kultur.

Kebangkitan atau revival

harus dimaknai sebagai kebangunan baru (*revival of the classic style*) yang menuntut nilai-nilai praksis yang baru dari nilai *intrinsic* nasionalisme itu. Kebangkitan baru politik nasional menyangkut ideologi, aktor politik, konstitusi dan demokrasi dalam bingkai nasionalisme. Hal yang mendasar dari nilai *intrinsic* nasionalisme Indonesia adalah kesepakatan untuk tetap dalam satu jiwa sesuai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Pancasila yang disepakati Bangsa Indonesia untuk merekatkan jiwanya sebagai kumpulan orang-orang yang berke-Tuhanan, orang-orang yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, orang-orang yang mendambakan persatuan Indonesia, orang-orang yang demokratis dengan sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta kumpulan orang-orang yang menghendaki suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebangkitan kumpulan orang-orang yang bersepakat dalam satu jiwa, menjunjung tinggi pluralisme, senasib sepenanggungan, anti penjajahan dan penindasan dalam berbagai bentuknya, dan yang lebih penting lagi anti pengkhianatan, karena sejak awal terbentuknya nasionalisme Indonesia tidak memberi

tempat pada kaum penghianat bangsa yang sering mengabaikan moral dan etika untuk kepentingan meraih sesuatu. Kebangkitan nasional Indonesia adalah kebangkitan nasionalismenya Indonesia yang bercirikan dan berjati diri pluralisme dan kekuatan moral. *Bhineka Tunggal Ikat an hana dharma mangrua*; berbeda itu sejatinya satu, yang satu itu adalah kebenaran, dan tidak ada kebenaran yang mendua. Jati diri nasionalisme seperti ini tidak akan bertahan bila moral sudah dikesampingkan. Kehancuran dan ketercabikannya hanya tinggal menunggu waktu bila moral sudah tidak lagi memperoleh tempat. Terlebih-lebih menghadapi kekuatan energinya globalisasi yang mengandalkan rasio menghalalkan segala cara dengan logika-logika hukum materil yang dibangunnya. Karena alasan moral dan etikalah nasionalisme Indonesia terpuruk, nasionalisme Indonesia tergadai, nasionalisme Indonesia tercabik-cabik, nasionalisme Indonesia sudah tidak lagi dalam satu jiwa, nasionalisme Indonesia tidak lagi senasib sepenanggungan, nasionalisme Indonesia yang mengalami kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan.

Roh nasionalisme Indonesia terletak pada ideologi pluralisme dan moralnya. Bila roh itu sudah hilang, nasionalisme Indonesia

hanya tinggal simbol-simbol semata yang tidak lagi memiliki makna dan nilai. Sistem politik yang dibangun dalam bingkai nasionalisme sudah tidak lagi ada maknanya kalau moral dan etika sudah ditinggalkan. Moral dan etika para aktor politik. Apabila politik itu mengenyampingkan moral seperti yang diungkapkan oleh Machiavelli bahwa; “.... a political worldview which described practical methods for an absolute ruler to attain and maintain political power. There is no moral basis on which to judge the difference between legitimate and illegitimate uses of power.”<sup>2</sup>; bukan berarti hal itu harus ditoleransikan, karena politik yang meninggalkan dan menanggalkan moral itulah yang sejatinya menjadi substansi sasaran reformasi, areal yang harus ditinggalkan serta menjadi *stand point* untuk bangkit (*to revive*) dalam melakukan kebangkitan (politik) nasional.

Kebangkitan nasional seharusnya menyadarkan kita akan hal ini. Kesadaran dari kumpulan orang-orang yang mengaku Bangsa Indonesia. Ini yang menjadi *vital interest* sebuah nasionalisme Indonesia dan *vital interest* dari politik nasional Indonesia. Karena vital,

seharusnya dijaga, dipelihara dan dijamin kelangsungan hidupnya, dari ancaman pembusukan dari dalam Bangsaanya sendiri dan atau dari luar Bangsaanya. Kita sadar bahwa perkembangan lingkungan strategis dengan universalisasi dan globalisasinya, cukup berpengaruh terhadap kualitas politik atau nasionalisme Indonesia. Paling tidak berpengaruh terhadap keamanan nasionalnya secara luas (*comprehensive security*), pembangunan ekonominya yang melahirkan konflik komunal di antara bangsa sendiri.

Kebangunan baru (*revival of the classic style*) menuntut nilai praksis yang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dan fenomenanya. Ada tuntutan terhadap Bangsa dan Penyelenggara Negara untuk mampu membaca tanda-tanda jaman. Dalam hal ini Kepemimpinan Nasional menjadi signifikan, karena struktur teknik masyarakat di era reformasi yang berkaitan dengan sistem hukum nasional masih jauh dari yang diharapkan. Kepemimpinan nasional yang dituntut adalah kepemimpinan nasional yang visioner dan berkualitas kenegarawanan. Kepemimpinan yang berpikir, bersikap dan bertindak sebagai

<sup>2</sup> From Wikipedia, the free encyclopedia <http://en.wikipedia.org/wiki/Politics>, 9 Februari 2008

negarawan. Berpikir negarawan adalah berpikir menggunakan paradigma nasionalisme ke-Indonesiaan sebagai landasan, mencakup landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, landasan visional wawasan nusantara, landasan konsepsional ketahanan nasional serta landasan peraturan perundang-undangan dan teori jelas dalam operasionalnya. Bersikap Negarawan adalah bersikap waspada kedalam dan keluar dari kemungkinan ancaman terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara. (*survival for the nation and the state*). Suatu sikap yang menuntut kepedulian tinggi terhadap jaminan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bertindak Negarawan adalah bertindak menggunakan Kebijakan dan strategi yang jelas menggunakan agenda-agenda kegiatan terprogram yang jelas juga. Programnya harus jelas, mana yang menjadi *core values*-nya, mana yang menjadi *major values*-nya dan mana yang menjadi *peripheral value*-nya.

### **Kewaspadaan Nasional terhadap Ancaman**

Secara substansi Kewaspadaan Nasional adalah suatu *sikap* dalam hubungannya dengan menjaga dan memelihara nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung

jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya dari suatu ancaman. Kewaspadaan nasional juga sebagai suatu *kualitas kesiapan dan kesiagaan* yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Kewaspadaan nasional dapat juga diartikan sebagai manifestasi *kepedulian dan rasa tanggung jawab* bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa/NKRI. Oleh karena itu kewaspadaan nasional harus bertolak dari keyakinan ideologis dan nasionalisme yang kukuh serta perlu didukung oleh usaha-usaha pemanfaatan sejak dini dan terus menerus terhadap berbagai implikasi dari situasi serta kondisi yang berkembang baik di dalam maupun di luar negeri (Lemhannas-RI, 2006).

Pertanyaannya adalah; bagaimana mengimplementasikan bentuk konkrit sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme, bentuk kesiapan dan kesiagaan dalam mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan pencegahan berbagai bentuk dan sifat ancaman terhadap NKRI, sehingga kesemuanya itu mencerminkan bentuk kepedu-

lian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa/ NKRI.

Implementasi adalah langkah-langkah konsepsional yang mengandung kebijakan yang harus ditempuh, pilihan strategi yang tepat serta program konkrit aplikatif yang harus dilakukan dalam menghadapi ancaman potensial maupun manifest. Bentuk konkritnya; implementasi bela negara, karena bela negara adalah; cinta tanah air, memiliki kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, serta memiliki sikap dan bertindak yang mencerminkan kerelaan untuk berkorban untuk bangsa & negara (<http://belanegara.dephan.go.id/>). Kesemua ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kewaspadaan nasional dalam menghadapi ancaman.

Tentang ancaman; diartikan sebagai sebuah kondisi, tindakan, potensi, baik alamiah atau hasil suatu rekayasa, berbentuk pisik atau non pisik, berasal dari dalam atau luar negeri, secara langsung atau tidak langsung diperkirakan atau diduga atau yang sudah nyata yang dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasionalnya. An-

caman itu sendiri dapat berasal dari luar maupun dalam negeri. Kedua-duanya selalu memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi sehingga sulit untuk dapat dipisahkan. Ancaman (keamanan) tradisional yang datangnya dari luar negeri adalah invasi atau agresi dari negara lain. Berdasarkan perkiraan, ancaman dalam bentuk ini kecil kemungkinannya. Oleh karena itu perkiraan ancaman yang lebih memungkinkan adalah ancaman non tradisional (*non traditional threat*) yaitu setiap aksi yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara kesatuan RI; ancaman terhadap wawasan nusantara. Wawasan Nusantara adalah wawasan Nasional Indonesia, yaitu cara pandang Bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 tentang diri dan lingkungannya di dalam eksistensinya yang serba Nusantara di dalam mengekspresikan diri di tengah-tengah lingkungan nasionalnya (Lemhannas-RI). Ancaman yang paling mungkin dari luar negeri terhadap Indonesia adalah kejahatan yang terorganisir yang dilakukan oleh aktor-aktor non negara untuk memperoleh keuntungan dengan memanipulasi kondisi dalam negeri dan keterbatasan aparatur pemerintah.

## Permasalahan Kontemporer Bangsa dan Negara

Secara umum sejak reformasi bergulir hingga saat ini, begitu banyak era reformasi mendulang permasalahan bangsa dan negara sebagai bentuk akumulasi permasalahan di era-era rezim pemerintahan sebelumnya yang ditambah dengan berbagai permasalahan baru dari dampak bawaan reformasi. Kondisi keamanan nasional belum menunjukkan tanda-tanda membaik secara signifikan. Keamanan Nasional yang mengandung pengertian terjaminnya kelangsungan hidup (*survival*) bangsa dan negara (*nation and state*) pada tataran lokal, provinsi, dan nasional, belum terlalu mengembirakan karena belum terlalu terlihat sinerginya untuk menghasilkan kenyamanan dan kesejahteraan. Sebagian masyarakat mengatakan bahwa bangsa ini mengalami stagnasi karena berputar di seputar yang sama tanpa menghasilkan sesuatu yang berarti dan dapat dirasakan. Kesenjangan di berbagai aspek kehidupan masih terasa. Integritas teritorial di beberapa wilayah masih menyimpan masalah. Kehidupan berdemokrasi masih terasa tidak sehat yang mengkait dengan penegakan hukum yang belum dapat dilakukan secara optimal.

Menyangkut masalah kea-

manan nasional. Konflik komunal dan vertikal serta konflik diagonal masih mewarnai kehidupan bangsa. Kebebasan menyampaikan pendapat dalam iklim reformasi acapkali menjadi berkembang dan menyimpang dalam bentuk kebringasan massa yang anarkhis. Usaha sistematis kelompok penekan terus merongrong pemerintah menimbulkan kegamangan dan menyebabkan posisi pemerintahan labil. Manajemen keamanan nasional menjadi lemah, lambat laun menjadi tidak efektif dalam menegakkan stabilitas keamanan nasional sehingga berpengaruh terhadap kondisi keamanan nasional. Peningkatan gangguan yang digambarkan di atas akan memberikan dampak negatif yang cukup serius bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa apabila tidak dapat ditangani dengan tepat akan menjadi issue keamanan nasional. Kedaulatan negara secara geografis maupun ideologis mengalami masalah. Integrasi nasional menjadi masalah serius, ketika menguatnya potensi beberapa daerah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang sudah mencuat ke permukaan seperti Aceh dan Papua termasuk RMS di Maluku, adalah sesuatu yang serius. Walau di Aceh keamanan secara pisik

sudah dirasakan, karena diakhirinya konflik bersenjata antara pemerintah dengan GAM melalui rekayasa MoU Helsinki, namun masa depan Aceh dalam pangkuan NKRI bagi sebagian masyarakat Indonesia masih banyak yang meragukan. Indikator keinginan beberapa kabupaten di Provinsi NAD yang menuntut pemekaran provinsi dari provinsi induknya adalah indikator masih rawannya keamanan Provinsi NAD. Kabupaten-kabupaten di bagian barat dan selatan provinsi NAD menuntut memisahkan diri dari NAD menjadi Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS), begitu juga beberapa kabupaten di bagian tengah dan tenggara NAD menuntut memisahkan diri dari NAD menjadi provinsi Aceh Leuser Antara (ALA). Motivasinya, mereka tidak bersedia disatukan dalam satu wadah di bawah kepemimpinan pimpinan daerah yang ada sekarang ini.

Gangguan terhadap ketertiban publik seperti terror, konflik komunal yang berlatar belakang primordialis (etnis, agama), radikalisme, kerusuhan atau pembangkangan masal, perdagangan narkoba, perjudian dan kejahatan lainnya yang tidak ditangani dengan tepat dapat akan meningkat dan berkembang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Situ-

asi ini akan diperkirakan berlangsung dalam waktu mendatang. (Departemen Pertahanan RI, 2005). Kondisi politik nasional Indonesia yang digambarkan ini sangat merugikan Indonesia dalam melakukan hubungan internasionalnya menyangkut pembangunan ekonomi, citra dan power untuk dibargainingkan dalam percaturan global.

Menyangkut masalah Ideologi Bangsa. Presiden SBY dalam pidatonya pada peringatan hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 2006 mengatakan;

“ dalam delapan tahun terakhir ini, di tengah-tengah gerak reformasi dan demokratisasi yang berlangsung di negeri kita, terkadang kita kurang berani, kita menahan diri, untuk mengucapkan kata-kata semacam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, Wawasan Kebangsaan, Stabilitas, Pembangunan, Kemajemukan dan lain-lain. Karena bisa-bisa dianggap tidak sejalan dengan gerak reformasi dan demokratisasi. Bisa-bisa dianggap tidak reformis”.

Pidato ini merupakan representatif dari sebuah kesadaran bahwa di era reformasi yang ditandai dengan demokratisasi justru kehidupan politik nasional Indonesia semakin menjauh dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Padahal Pancasila adalah ideologi negara yang konstitusional. Artinya sekalipun Tap MPR RI No. XVIII/MPR/1998 mencabut

Tap MPR RI No II/MPR/1978 tentang P4, namun dalam Tap tersebut Pancasila tetap diberlakukan sebagai ideologi negara. Euforia reformasi telah menjadikan kehidupan nasional Indonesia salah arah, kebablasan, kehilangan kompas, dan mengabaikan kewaspadaan nasional dari berbagai bentuk ancaman yang menghadangnya. Kondisi ini dirasakan selama satu dasa wara di tengah hiruk pikuk dan kegaduhan demokratisasi. Demokrasi dianggap seakan hanya sebuah tujuan dari suatu kebutuhan kehidupan nasional yang dianggap juga sudah tidak lagi membutuhkan rambu-rambu, pedoman dan atau sikap yang disebut kewaspadaan nasional. Kebangkitan nasional sebagai bentuk penyadaran diri, menjadi momentum tepat untuk mengakhiri ini, agar kehidupan politik nasional kembali kepada relnya yang benar. Kondisi ini juga harus segera diakhiri, sebelum disintegrasi bangsa semakin mendekat di depan mata, karena kualitas kewaspadaan nasional kita sudah semakin rendah.

Tentang ideologi Pancasila, As'ad Said Ali (2007) mengatakan bahwa:

“Ideologi adalah seperangkat keyakinan, nilai-nilai dan sikap yang mendasari suatu negara/pemerintah atau partai politik. Ideologi mempunyai fungsi psikologi dan

social. Ketika negara atau partai politik berada dalam situasi krisis, ideology berfungsi sebagai rujukan atau peta kognitif dan tuntunan moral. Sedangkan secara social, ideology berperan dalam memotivasi, mengarahkan dan mengkoordinasikan perilaku kolektif. Atas dasar asumsi tersebut, ideology bisa ditempatkan sebagai instrumen yang menyatukan individu yang satu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Pancasila adalah rujukan ideology bagi seluruh warga bangsa, sehingga apabila muncul kegagalan terhadap Pancasila tentu berbagai kesepakatan di dalam masyarakat sulit dicapai dan berakibat timbulnya situasi yang tidak menentu. Dalam suasana seperti itu, masyarakat sulit diajak untuk membangun kebersamaan. Dengan demikian memfungsikan kembali Pancasila sebagai ideology negara dalam praktek bernegara adalah suatu keniscayaan”.

Permasalahan-permasalahan kontemporer lain yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan kita; wawasan nusantara, Prof. Muladi mengidentifikasi secara nasional bahaya-bahaya yang mengancam Wawasan Nusantara dalam arti fisik dan sosial antara lain (Muladi, 2007):

- Belum seluruh negara meratifikasi UNCLOS 1982 (contoh AS dalam kasus Bawean).
- Belum adanya UU yang mengatur wilayah dengan batas-batas dan hak-haknya sebagaimana diamanatkan oleh pasal 25 A UUD 1945.

- Lemahnya "*effective occupation*" mengingat banyaknya pulau dan luasnya wilayah, serta terbatasnya sumber daya, sarana dan SDM.
- Ikatan premordial yang semakin menajam akibat Globalisasi dan bagi yang tidak dapat menyesuaikan diri akan mencari "*traditional shelter*".
- Keberadaan 17.000 pulau lebih di samping merupakan asset nasional, juga mengandung kerawanan mengingat koridor untuk masuk ke wilayah nasional tak terhitung.
- Dampak multi dimensional Globalisasi dengan meningkatnya ICT Technology, sehingga sulit mengontrol pengaruh budaya, ideas/ideology, manusia, informasi melewati batas wilayah negara yang tidak jarang berseberangan dengan kepribadian bangsa.
- Bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh "*non traditional/non military security threat*" seperti kejahatan *transnational* terorganisasi (perdagangan senjata api, imigran gelap, narkoba, money laundering, illegal fishing, illegal logging, illegal mining, campur tangan elemen-elemen asing dalam gerakan separatisme, terorisme yang dimotori oleh radikalisme yang bersifat *transnasional*, pembuangan limbah beracun/B3, penyakit menular, konflik horizontal yang tidak jarang mengundang solidaritas kelompok-kelompok asing dan lain-lain).
- Partisipasi dan kesadaran nasional masyarakat di perbatasan yang lemah akibat kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan.
- Koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang masih perlu ditingkatkan.
- Otonomi daerah yang sering ditafsirkan sebagai pembagian kekuasaan.
- Kuantitas penduduk yang belum diimbangi dengan kualitas SDM.
- Belum berkembangnya alternatif energi yang terbarukan.
- Melemahnya kesadaran terhadap ideologi bangsa dan karakter nasional lainnya.
- Iklim investasi yang kurang atraktif.
- Ikatan primordial yang yang menonjol kembali.
- Penegakan supremasi hukum yang belum memuaskan.
- Partai-partai politik yang belum melaksanakan perannya dengan baik sesuai dengan Undang-Undang.
- Implikasi pemisahan fungsi pertahanan dan fungsi keamanan yang bersifat dikotomis dengan segala implikasinya.
- Berkembangnya doktrin "*pre-emptive strike*" atau "*anticipa-*

tory self defence" setelah peristiwa 9/11.

- Analisis kecenderungan Global sampai 2015 yang cukup memprihatinkan, baik yang berkaitan dengan aspek demografi, kekayaan alam dan lingkungan, sains dan teknologi, ekonomi global dan globalisasi, pemerintahan nasional dan internasional, konflik mendatang maupun peranan negara-negara maju.

Di era reformasi, begitu banyak permasalahan di daerah yang membutuhkan perhatian serius dan sungguh-sungguh sejak reformasi bergulir yang menghasilkan bergesernya peran pusat kedaerahan sebagai bentuk perubahan pemerintahan yang sentralistik menjadi pemerintahan yang desentralistik yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Dalam suatu kesempatan Presiden SBY sudah mengingatkan bahwa

" Dalam alam reformasi ini, untuk kepentingan yang benar, kita melakukan desentralisasi dan otonomi daerah. Tapi pahami betul, proses yang penting ini tidak boleh menggoyangkan sendi-sendi NKRI, sendi-sendi Kebangsaan, karena bisa menggoyakkan kerangka bernegara kita. Desentralisasi dan otonomi daerah pilihan, ketika di masa lalu terasa pembangunan ini kurang merata, kurang adil, sentralistik dan konsentrik, kita bedah, kita lakukan pemberdayaan dan kita perbaiki sistem pemerintahan seperti ini. Namun sekali lagi jangan sampai ikatan

kesukuan, ikatan keagamaan, ikatan etnis, ikatan kedaerahan dan lain-lain menabrak ikatan kebangsaan yang harus kokoh kita pertahankan."

Penyampaian Presiden SBY seperti di atas, adalah penyampaian yang menggambarkan adanya sebuah realita bahwa otonomi daerah masih menyimpan berbagai permasalahan di berbagai aspek. Walau demikian, tetap muka Presiden SBY dengan para bupati, walikota, dan ketua DPRD kabupaten/kota, pada tanggal 8 April 2008, para bupati, walikota dan ketua DPRD kabupaten/kota berkomitmen bahwa; " otonomi daerah tetap menjadi sebuah kebutuhan dan integrasi nasional tetap juga menjadi sebuah keniscayaan".

Begitu banyak di era reformasi ini Indonesia menghadapi permasalahan. Belum lagi masalah-masalah bencana alam, masalah kebutuhan pangan, energi dan masalah perekonomian lainnya. Berangkat dari kesadaran akan kondisi inilah seharusnya Indonesia bangkit dan bangun dengan tidak henti-hentinya mencoba dan menemukan nilai-nilai praksis yang baru yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup Bangsa dan Negara ini dalam wadah NKRI dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Kewaspadaan Nasional untuk kepentingan Ketahanan nasional Indonesia.

## Penutup

Pada tanggal 20 Mei 2008, tepat seratus tahun hari kebangkitan nasional. Tahun 2008 juga menjadi tahun kesepuluh atau satu dasa warsa era reformasi. Kebangkitan nasional yang secara substansi merupakan bentuk penyadaran nasional dari sebuah nasionalisme yang diartikan sebagai bentuk penyadaran satu jiwa dari kumpulan bangsa-bangsa pra-nasional yang memiliki jati diri *bhineka tunggal ika - tan hana dharma mangrua*, untuk menjadi bangsa yang satu; bangsa Indonesia, berbahasa satu; bahasa Indonesia; bertanah air satu; tanah air Indonesia dalam wadah NKRI dari Sabang sampai Meraoke berdasar Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi kemultikulturalnya dan pluralisme.

Kewaspadaan Nasional yang diartikan sebagai sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme, untuk peduli dengan kelangsungan kehidupan politik nasional dari faktor ancaman, dipraktekkan dalam (gerakan) reformasi untuk melakukan koreksi dan menghentikan praktek-praktek deviasi jalannya politik nasional yang menyimpang dari amanat pembukaan UUD 1945.

Walau era reformasi menjadi sebuah bentuk implementasi kewaspadaan nasional, namun secara empiris dalam perjalanan

sepuluh tahunnya sejak 1998, bukannya steril dari berbagai permasalahan, kesalahan dan deviasi. Oleh karenanya, melalui kewaspadaan nasional juga yang diartikan sebagai bentuk sikap kesiapan dan kesiagaan bangsa dalam melakukan deteksi dini, peringatan dini, pencegahan dini, penangkalan dini dan tanggap awal menghadapi ancaman yang akan membahayakan kelangsungan kehidupan nasional, reformasi sepantasnya dikritisi melalui penyadaran nasional.

Reformasi tidak boleh menjadi bentuk kewaspadaan yang sudah tidak lagi waspada, reformasi tidak boleh menjadi sapu pembersih yang tidak lagi bersih, reformasi tidak boleh menjadi alat koreksi yang tidak boleh dikoreksi. Untuk itu reformasi perlu dikonsolidasikan, dan untuk itu reformasi disadarkan melalui penyadaran nasional atau kebangkitan nasional (*national revival*). Pada tahun 2008 di saat kebangkitan nasional kita peringati 100 tahun dan reformasi kita peringati 10 tahun, inilah momentum yang harus kita ambil dan gunakan, untuk menemukan konsep cerdas bagaimana menjalankan politik nasional yang menjamin kebaikan bersama. Melalui kewaspadaan nasional yang terukur dan reformasi yang dikonsolidasikan, maka

kebangkitan nasional dengan (gerakan) penyadaran nasional akan jati diri bangsa yang *bhineka tunggal ika-tan hana dharma mangrua*, konsep cerdas berbasis moral dan etika akan ditemukan untuk kehidupan bersama yang baik (*public good*) dalam wadah NKRI berdasar Pancasila dan UUD 1945. Inilah masa depan Indonesia yang diharapkan.

### Bahan Bacaan

As'ad Said Ali, 2007, Ideologi Negara versus Ideologi Partai, Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen April 2007. Centre For the Study And Counterintelligence, Jakarta.

Departemen Pertahanan RI, 2005

Muladi, 2006, Relevansi Doktrin Ketahanan Nasional (*National Resilience*) terhadap Kekuatan Nasional (*National Power*). Kerangka Ceramah di KRA XXXIX Lemhannas-RI, Jakarta.

Lemhannas-RI, 1997, Catur Windu Lembaga Ketahanan Nasional.

Lemhannas-RI, 2006, Ketahanan Nasional Indonesia.

Lemhannas-RI, 2003 Buku Induk Wawasan Nusantara

Lemhannas-RI, 2006 Modul Kewaspadaan Nasional.

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992; bab 4" Kekuasaan Politik", Purwo Santoso Kumpulan Bahan bacaan Mata Kuliah Politik Indonesia dan Otonomi Daerah.

Yudhoyono, Susilo Bambang, DR.H, 2006 Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila, Pidato Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2006, Jakarta Convention Center.

<http://belanegara.dephan.go.id>